



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI X DPR RI
KE KABUPATEN BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR
PADA MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2022—2023
TANGGAL 14 S.D. 18 JULI 2023

=====

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Pasal 20A ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945.
2. Pasal 98 ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
3. Pasal 59 ayat (5) huruf f Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
4. Keputusan Pimpinan DPR RI tentang penugasan kepada anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan Kunjungan Kerja Berkelompok Masa Reses pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022--2023.
5. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 16 Mei 2023 tentang rencana kunjungan kerja Komisi X DPR RI Masa Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022--2023 ke Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Sumatera Barat, dan Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur.

B. Tujuan

Kunjungan kerja ini ditujukan untuk mendapatkan penjelasan secara langsung dari pejabat daerah mengenai implementasi undang-undang dan kebijakan yang dilakukan pemerintah, menggali dan menyerap aspirasi dari daerah, dan mendapatkan masukan berupa data-data faktual dan berbagai persoalan tentang pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga, serta perpustakaan di daerah yang dikunjungi.

C. Tim Kunjungan Kerja

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022--2023 ke Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur dipimpin oleh Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP didampingi oleh Anggota Komisi X DPR RI, Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI, Wartawan Sekretariat Jenderal DPR RI, serta pejabat dari Mitra Kerja Komisi X DPR RI.

D. Agenda Kunjungan Kerja

1. Pertemuan dengan Wakil Bupati Banyuwangi H. Sugirah, dihadiri:
 - a. Muspida dan Forkopimda Kabupaten Banyuwangi.
 - b. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Suratno.
 - c. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, Muhammad Yanuarto Bramuda.
 - d. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi, Abdul Aziz Hamidi.
 - e. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Banyuwangi, Drs. Zen Kostolani, M.Si.
 - f. Dewan Pendidikan dan Perwakilan Organisasi Profesi Guru (PGRI, IGI, FSGI) Tokoh-tokoh Pendidikan, dan para Pakar Pendidikan Kabupaten Banyuwangi
 - g. Perwakilan Organisasi Kepemudaan (KONIDA, KNPI, Gerakan Pramuka)
 - h. Ketua LPMP Provinsi Jawa Timur
 - i. Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII Jawa Timur, Pimpinan PTN dan PTS, yaitu:
 - 1) Direktur Politeknik Negeri Banyuwangi.
 - 2) Ketua Program Studi di Luar Kampus Utama (PSKU) Universitas Airlangga di Banyuwangi.
 - 3) Rektor IKIP PGRI Banyuwangi.
 - 4) Rektor Universitas PGRI Banyuwangi
 - 5) Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi.
2. Melakukan pertemuan dengan pelaku pariwisata di Kabupaten Banyuwangi yang dipimpin oleh kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi Muhammad Yanuarto Bramuda, yang dihadiri oleh:
 - a. PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia).
 - b. ASITA (Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia).
 - c. GAHAWISTRI (Gabungan Pengusaha Wisata Bahari dan Tirta).
 - d. AKPI (Asosiasi Kawasan Pariwisata Indonesia).
 - e. HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia).
 - f. Masyarakat Pariwisata Indonesia (MPI).
 - g. Hotel Human Resources Managers Association (HHRMA)
 - h. Himpunan Penulis Pariwisata (HPP).
 - i. Generasi Pesona Indonesia (GenPI).
 - j. Pemangku kepentingan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya di Kabupaten Banyuwangi.
 - k. Pegiat pariwisata dan pelaku ekraf.
3. Melakukan kunjungan di Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Banyuwangi.

II. ISI LAPORAN

A. Identifikasi Data dan Informasi

1. Bidang Pendidikan

Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan signifikan, diantaranya melalui (1) peningkatan aksesibilitas pendidikan dasar (2) peningkatan jumlah sekolah (3) peningkatan kualitas pendidikan (4) mendorong inovasi dalam pembelajaran (5) program pemberdayaan masyarakat terkait pendidikan. Beberapa program yang dicanangkan antara lain program pendidikan rintisan desa tuntas wajib belajar 12 tahun (Rindu Bulan), gerakan daerah angkat anak putus sekolah (Garda Ampuh), siswa asuh sebaya (SAS), uang saku dan uang transport bagi pelajar kurang mampu, beasiswa Banyuwangi cerdas, Banyuwangi mengajar, program akselerasi sekolah masyarakat (Aksara) dan lain-lain.

2. Bidang Kebudayaan

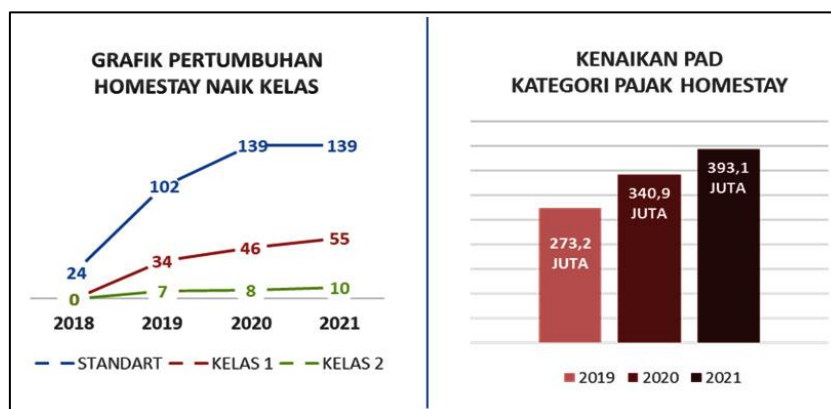
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengembangkan ide inovatif di bidang kebudayaan, yaitu (1) program *offline to online* dengan pembuatan aplikasi sijamuwangi LBP (*looking, booking, payment*), penyediaan fitur *barcode* untuk *self guiding*, pembuatan konten promosi museum di media sosial; (2) gelaran even, yaitu menggelar even pameran kepurbakalaan untuk menarik minat wisatawan; (3) redesain bangunan, yaitu membangun museum dengan konsep kekinian dan milenial, dan membuat konten museum banyuwangi tempoe doeloe. Program tersebut mendorong terjadinya perubahan yaitu: (1) peningkatan kunjungan ke museum di tahun 2022 mencapai 358%; (2) telah ada kontribusi positif terhadap PAD sejak tahun 2022 dan meningkat setiap tahun; (3) *offline to online* pelayanan kunjungan dilakukan melalui Sijamuwangi. Kegiatan ini menaikkan kunjungan ke museum, berikut kunjungan dan pendapatan museum.



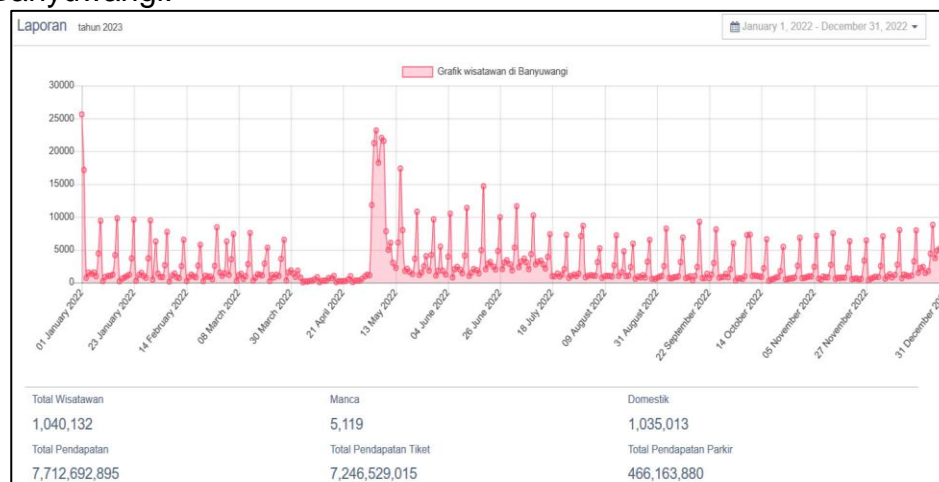
3. Bidang Pariwisata

a. Pemerintah Banyuwangi meningkatkan jumlah dan melakukan program *homestay* naik kelas (setara hotel), sehingga sejak tahun 2018 yang hanya terdapat 24 unit *homestay* yang tersandarisasi, naik menjadi 204 unit *homestay* terstandarisasi. Dari jumlah tersebut,

terdapat 65 unit *homestay* yang naik kelas. Rata-rata harga kamar adalah Rp250—500 ribu/kamar dengan rata-rata pendapatan pemilik *homestay* Rp2 Juta hingga 4 Juta per bulan. Berikut grafiknya:



- b. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan program *e-Ticketing* wisata, dengan manfaat (1) pengelola destinasi wisata tidak perlu mengeluarkan modal awal untuk porporasi karcis; (2) report kunjungan wisatawan dapat dipantau *realtime*; (3) perhitungan pendapatan retribusi tiket destinasi lebih optimal sehingga meningkatkan PAD; dan (4) dapat dilakukan evaluasi mingguan terkait naik-turun wisatawan. Berikut grafik jumlah wisatawan Banyuwangi.



- c. Berikut data jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara di Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2014- 2022.

TAHUN	JUMLAH WISATAWAN DOMESTIK	JUMLAH WISATAWAN MANCANEGERA
2014	1.164.948	30.681
2015	1.926.179	46.214
2016	4.022.449	77.139
2017	4.832.999	98.970
2018	5.039.934	127.420
2019	5.307.054	101.662
2020	3.019.875	27.224
2021	1.862.553	3.854
2022	2.948.543	29.020

- d. Tingkat okupasi hotel dan *homestay* sepanjang pandemi Covid-19 lebih baik. Pada 16 Maret 2020, melalui surat edaran bupati Banyuwangi, seluruh destinasi tutup. Sehingga pada bulan April—Juni secara manajemen ada 25 hotel dan resto melakukan penutupan sementara. Namun setelah itu dibuka kembali dan mengalami peningkatan. Berikut grafik okupasi hotel dan *homestay* pada 2019--2020.



4. Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan

- Pemerintah daerah Banyuwangi telah melakukan berbagai program pembinaan pemuda, diantaranya menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, dan keterampilan lainnya untuk membantu pemuda dalam mempersiapkan masa depan mereka. Selain itu, pemerintah daerah juga menyediakan beasiswa pendidikan bagi pemuda berprestasi.
- Dalam hal even olahraga, Banyuwangi menggelar berbagai even olahraga untuk mempromosikan dan mengembangkan minat masyarakat. Misalnya, Banyuwangi *Ethno Carnival*, *Tour de Banyuwangi*, dan lain-lain. Selain itu, Banyuwangi juga mengembangkan pariwisata olahraga dengan memanfaatkan potensi alam. Kawasan Gunung Ijen, digunakan sebagai lokasi untuk event lari trail dan hiking. Surfing di Pantai Plengkung juga menjadi daya tarik bagi peselancar dari dalam dan luar negeri.

5. Bidang Perpustakaan

Pada kunjungan ke dinas perpustakaan dan kearsipan di Jl. Jaksa Agung Suprpto, kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Zen Kostolani beserta Pustakawan Ahli Madya Fitrin Kuntartini, menyampaikan terkait layanan yang ada di Pojok Baca Digital yang merupakan hibah dari Perpustakaan Nasional RI. Hibah tersebut diantaranya berupa layanan digital E-book atau buku digital, Aplikasi Buku Digital Warga Banyuwangi (Budiwangi) yang dapat di unduh di *playstore* melalui *smartphone*, Aplikasi Buku Digital *iPusnas*, website Dispusip Banyuwangi, dan fasilitas berupa akses komputer, tablet, televisi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

B. Permasalahan dan Temuan

Dalam pertemuan dan kunjungan lapangan terdapat permasalahan dan temuan pokok yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan, antara lain, sebagai berikut.

1. Politeknik Banyuwangi sebagai perguruan tinggi negeri baru terkendala minimnya SDM pendidikan dengan status PNS dan PPPK, serta terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan.
2. Menurut Ketua PGRI Banyuwangi, pengangkatan guru honorer menjadi ASN (PNS maupun PPPK) sangat lambat meski ada perkembangan sejak tahun 2021. Namun masih ada sekitar 1,6 Juta guru honorer yang belum diangkat, tahun 2022 masih ada 400 ribu guru honorer dan tahun 2023 ada sekitar 200 ribu yang belum diangkat.
3. Akreditasi prodi pada perguruan tinggi swasta yang dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri biayanya sangat memberatkan.

C. Masukan dan Aspirasi Pemangku Kepentingan

Dalam pertemuan dan kunjungan lapangan terdapat masukan serta aspirasi dari para pemangku kepentingan di Banyuwangi, antara lain, sebagai berikut.

1. Mengharapkan ada penambahan pustakawan di Banyuwangi untuk meningkatkan layanan perpustakaan.
2. Mengusulkan adanya bantuan operasional untuk perguruan tinggi swasta (PTS).
3. Mengusulkan dihapuskannya biaya akreditasi oleh lembaga akreditasi mandiri.
4. Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan perlu dikaji ulang, karena banyak hal yang tidak sesuai dan bertentangan.
5. Pemerintah pusat agar segera menyusun peta jalan pembangunan literasi, sehingga literasi dapat dikelola dengan baik dan dapat berkembang, serta dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.
6. Banyuwangi belum memiliki lapangan atletik, sehingga dibutuhkan dukungan untuk membangun sarana atletik.
7. Dewan Kesenian dan Kebudayaan Banyuwangi menyampaikan usulan bahasa Osing diakui dan dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. Sesuai dengan kebijakan Merdeka Belajar, maka revitalisasi bahasa daerah seperti bahasa Osing paling potensial untuk diakui dan dikembangkan. Oleh karena itu, perlu bantuan pemerintah untuk menerbitkan buku-buku berbahasa osing.
8. Pemangku kepentingan pariwisata mengusulkan agar ada penambahan jumlah penerbangan Jakarta—Banyuwangi dan sebaliknya, dengan harga tiket yang terjangkau.
9. Mengenai revisi Undang-Undang tentang Kepariwisata, Pemerintah Daerah Banyuwangi dan para pemangku kepentingan pariwisata mengusulkan:
 - dalam pengembangan dan pengelolaan desa wisata atau pariwisata berbasis masyarakat harus berdasarkan kehidupan budaya setempat, dan pemerintah boleh membantu, akan tetapi tidak boleh intervensi.

- Kebijakan pariwisata harus berdampak kepada rakyat, seperti dalam setiap bangunan harus mengakomodir konten lokal.
- Pembangunan destinasi pariwisata oleh investor harus mempertimbangkan okupasi antara hotel dan homestay secara berkeadilan.
- Adanya reward untuk pelaku pariwisata yang berprestasi, termasuk pokdarwis yang berprestasi.

III. PEMBAHASAN

Selama kunjungan kerja ke Kabupaten Banyuwangi, tim kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI melakukan pertemuan dengan wakil bupati Banyuwangi dan jajaran serta para pemangku kepentingan bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda, olahraga, dan perpustakaan. Dari pertemuan tersebut terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dan mendapatkan respon dari tim kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI, dan tanggapan dari pemangku kepentingan, antara lain, sebagai berikut.

1. Wakil Bupati Banyuwangi (H. Sugirah) menyampaikan beberapa catatan dan pandangannya mengenai pembangunan di Banyuwangi, khususnya terkait bidang pariwisata, yaitu bahwa perkembangan Banyuwangi selama sepuluh tahun terakhir menunjukkan upaya yang serius dari pemerintah daerah untuk mengembangkan pariwisata, terutama pariwisata berbasis budaya lokal, sebagai salah satu sektor pembangkit pertumbuhan ekonomi. Melalui investasi dalam infrastruktur, diversifikasi produk kreatif dan produk wisata, promosi yang intensif, serta penghargaan dan pengakuan yang diterima, Banyuwangi berhasil menarik perhatian wisatawan dari dalam dan luar negeri, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui sektor pariwisata. Kabupaten Banyuwangi berhasil mengubah citranya, dari “kota santet” menjadi “kota internet”. Banyuwangi menawarkan berbagai daya tarik seperti keindahan alam, budaya dan tradisi, seni dan kerajinan, kuliner, serta ekowisata.
2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Banyuwangi Abdul Aziz Hamidi, menyampaikan beberapa catatan, antara lain:
 - a) kegiatan keolahragaan di Banyuwangi dikolaborasikan dengan pariwisata yang melibatkan seluruh SKPD. Kegiatan *Tour de Banyuwangi* banyak melibatkan wisatawan luar negeri. Kegiatan olahraga INKAI (karate) juga menjadi kegiatan andalan di Banyuwangi.
 - b) kegiatan kepemudaan, program Jagoan Digital tidak hanya melahirkan *start-up* lokal, namun lebih dari itu kami melihat program ini menjadi *talent pool* atau wadah talenta yang siap untuk bekerja di *start-up* besar nasional. Beberapa contoh dari alumni program jagoan digital telah menjadi tim di *start-up* besar.
3. Dosen/akademisi Politeknik Banyuwangi menyampaikan antara lain terkait menurunnya beasiswa KIP kuliah yang tajam. Sebagaimana PTN baru lainnya, Politeknik Banyuwangi juga terkendala oleh minimnya jumlah

pegawai, baik PNS maupun P3K. Politeknik Banyuwangi membutuhkan perhatian terkait kendala umum yang dihadapi oleh PTN baru seperti sarana dan prasarana, pegawai, maupun KIP kuliah.

4. Dosen/akademisi Universitas PGRI Banyuwangi menyampaikan bahwa 30% mahasiswanya adalah penerima beasiswa. Oleh karena itu, beasiswa sangat penting bagi Universitas Swasta. Universitas PGRI Banyuwangi sebagai PTS, mengusulkan adanya program semacam bantuan operasional (seperti BOS) untuk PTS. Universitas PGRI Banyuwangi mengusulkan porsi yang sama antara PTN dan PTS terkait anggaran negara, meskipun Universitas PGRI Banyuwangi juga telah mendapat anggaran penelitian (16 proposal penelitian) maupun program *matching fund*. Senada dengan dosen Universitas Banyuwangi, Dosen/akademisi Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi menyampaikan dukungan untuk adanya dana operasional untuk PTS (semacam BOS) mengingat ada 3000-an PTS dan hanya 184 PTN di Indonesia, sehingga proporsional anggaran juga perlu berpihak pada PTS. Universitas 17 Agustus 1945 mengusulkan dihilangkannya biaya akreditasi agar tidak ada komersialisasi pendidikan.
5. Mengenai literasi, aktivis Rumah Literasi Indonesia di Banyuwangi (Bapak Tunggul), menyampaikan beberapa catatan dan pandangan, antara lain:
 - a) data literasi menunjukkan bahwa 30,78% masyarakat masih terkendala literasi membaca, 71,35% terkendala literasi numerasi, dan 68,83% terkendala literasi sains. Oleh karena itu Rumah Literasi Indonesia bekerja untuk mengatasi kendala literasi masyarakat tersebut.
 - b) tahun 2014 Rumah Literasi Indonesia dibentuk, namun baru pada 2018 bergerak menjadi Yayasan karena dapat lebih mudah berkembang, terutama dengan adanya pengurus, serta lebih mudah mendapatkan dukungan, termasuk dukungan dari Pertamina.
 - c) peningkatan literasi telah menyentuh desa sebagai garda depan dalam membangun literasi. Dana desa diharapkan 5% dapat digunakan untuk pembangunan literasi, namun hal ini butuh dorongan.
 - d) Dibutuhkan peta jalan pembangunan literasi, antara lain untuk mendorong partisipasi publik dan adanya privat sektor terhadap gerakan literasi sehingga ada capaian yang diharapkan.
6. Ketua PGRI Banyuwangi Sudarmawan, menyampaikan terkait guru honorer masih terdapat permasalahan, khususnya dalam hal pengangkatan guru honorer menjadi ASN (PNS maupun PPPK).
7. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, Muhammad Yanuarto Bramuda, menyampaikan antara lain bahwa Banyuwangi memiliki beberapa kiat dan strategi pengembangan pariwisata:
 - a. adanya kepemimpinan berkelanjutan, visi yang jelas, serta kolaborasi antar instansi terkait. Sejak sekitar duabelas tahun ini, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengembangkan visi membangun budaya lokal, pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan visi yang jelas, yaitu “keberpihakan kepada masyarakat lokal”. Komitmen ini juga didukung

- para pemimpin instansi di Banyuwangi, sehingga menggerakkan perangkat birokrasi sebagai penggerak berbagai program pariwisata dengan menggandeng masyarakat.
- b. adanya dukungan sejumlah aturan atau regulasi yang berpihak kepada kearifan lokal, tradisi dan budaya, yang antara lain diwujudkan melalui kebijakan tata ruang dan tata bangunan, serta penguasaan lahan yang adil, sehingga masyarakat tetap terlibat dalam pengembangan industri pariwisata tanpa tergusur oleh kekuatan investasi dari luar. Kebijakan *sustainable tourism* dipertahankan, dengan menjaga keaslian budaya, adat-istiadat, hingga kepemilikan lahan, diupayakan tetap menjadi milik masyarakat lokal.
 - c. adanya dukungan pengembangan wisata yang bermodel *community-based tourism*, dimana komunitas lokal terlibat aktif dengan terbentuknya berbagai komunitas dalam bentuk asosiasi pariwisata. Setiap pelaku dan komunitas, berasosiasi dan bekerjasama, mulai dari pemilik *homestay*, Pokdarwis, pramuwisata, operator tour dan travel, dan lain-lain, sehingga memudahkan mereka untuk bekerjasama dan memberikan saran dan masukan kepada pemerintah setempat.
 - d. adanya keterlibatan dan partisipasi langsung dari masing-masing komunitas yang ada di masyarakat dalam penyelenggaraan berbagai even daerah. Keterlibatan masyarakat, menunjukkan bahwa masyarakat adalah pelaku sekaligus penerima manfaat dari pengembangan pariwisata. Selain pengembangan infrastruktur dan dukungan regulasi, peran pemerintah terbatas kepada kebijakan untuk melakukan akurasi dan memberikan stimulasi bagi tumbuhnya berbagai atraksi (even budaya) dan amenitas (keramahan penduduk) yang memang sudah ada di masyarakat.
8. Dewan Kesenian dan Kebudayaan Banyuwangi menyampaikan bahwa selama 12 tahun terakhir, kinerja Pemerintah Banyuwangi sangat keras, sehingga berhasil merubah *image* kota santet menjadi kota internet. Pengembangan wisata dan pemanfaatan kebudayaan tetap berprinsip pada kepemilikan oleh masyarakat lokal. Selain itu, bahwa perkembangan pariwisata di Banyuwangi menunjukkan pengembangan pariwisata yang bersifat *bottom up*, bukan *top down* sebagaimana agenda pemerintah membangun destinasi prioritas maupun superprioritas yang menghilangkan keterlibatan masyarakat lokal.
 9. Pengelola Geopark Ijen mengusulkan agar tiket pesawat dapat ditekan sehingga dapat memobilisasi wisatawan. Banyuwangi siap menyelenggarakan kegiatan MICE. Selain itu, perlu regulasi tentang investasi yang berbasis pariwisata.
 10. Perkumpulan Ruang Inap Banyuwangi, menyampaikan antara lain (1) *homestay* memiliki tawaran dan kelebihan tersendiri dibanding hotel, yaitu *experience* bagi wisatawan; (2) kebijakan pemda dalam pengembangan *homestay* adalah boleh memiliki 10 kamar; (3) digitalisasi *homestay* sangat diperlukan dan telah mendukung *homestay* berkembang; (4) perlu ada definisi yang jelas terkait *homestay* dan *hostel*.

11. Pengurus PHRI Banyuwangi (Zainal), menyampaikan bahwa di seluruh kecamatan di Banyuwangi memiliki hotel dengan okupasi tahun 2020 mencapai 60-64% dan tahun 2021 meningkat menjadi 70%. Selain itu, Pokdarwis Banyuwangi (Azis), juga menyampaikan bahwa 100 lebih destinasi di Banyuwangi dikoordinasi oleh Pokdarwis. Warga diberikan solusi untuk meningkatkan perekonomiannya karena 90% dikelola oleh masyarakat.
12. Agen Tour dan Travel Banyuwangi Mbak Feni, menyampaikan telah sering mendampingi anak-anak PKL di bidang pariwisata. Pengembangan SDM lokal sangat penting terutama terkait peran guide lokal. Sertifikasi guide harus dapat memberikan prioritas dalam setiap kegiatan wisata, bukan guide dari tempat lain.
13. Dosen/akademisi Politeknik Banyuwangi, menyampaikan bahwa dari 11 Prodi yang dimiliki, Prodi Pariwisata memiliki peminat terbanyak bahkan peminatnya melebihi kuota. Namun, dibutuhkan sarpras yang memadai. Saat ini Politeknik Banyuwangi berstatus sebagai PTN baru, masih berupa Satker dan membutuhkan KIP bagi mahasiswanya.
14. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpustakaan RI Dr. Joko Santoso, M.Hum, menyampaikan antara lain bahwa Perpustakaan mengagendakan 1 desa 1 perpustakaan dengan berbasis pada inklusi sosial. Tahun 2024 ditargetkan ada 186 desa yang memiliki perpustakaan desa. Pojok baca dapat dikembangkan dalam program ini. Selain itu, riset perguruan tinggi dapat terlibat dalam pengembangan perpustakaan, terutama pelibatan multimedia.
15. Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Kemendikbudristek RI Judi Wahjudin, S.S., M.Hum. menyampaikan antara lain terkait kebudayaan, Banyuwangi dapat memanfaatkan dana Indonesiana dalam mengembangkan *storytelling* yang banyak dimiliki, karena sampai saat ini, dana Indonesian ini belum banyak yang memanfaatkan.
16. Sekretaris Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kemenparekraf/Baparekraf RI Dra. Riwud Puji Rahayu, M.Pd, menyampaikan bahwa pariwisata dapat berkolaborasi dengan ilmu pengetahuan, termasuk literasi, melalui pengembangan *storytelling*. Perpustakaan dapat mengadakan even yang berkolaborasi dengan SKPD lain sehingga bukan hanya pengembangan literasi yang didapat tapi juga menjadi wisata edukasi.
17. Dari beberapa pertanyaan dan pandangan dari pemangku kepentingan di Banyuwangi, Komisi X DPR RI memberikan tanggapan dan pandangan, antara lain:
 - a) PTN baru yang masih berbentuk Satker memang dibatasi pagu anggarannya. Namun, Komisi X DPR RI selama ini telah berkomitmen untuk penambahan anggaran agar bisa ditambah (misalnya dari BA-BUN), termasuk penambahan KIP kuliah dan anggaran untuk bantuan

operasional PTS yang saat ini masih dalam skema *matching fund* dan *competitive fund*. Selain itu, anggaran fungsi pendidikan yang harus dibagi dengan kementerian/lembaga lain, cukup mempersempit ruang anggaran pendidikan yang dikelola oleh Kemendikbudristek RI.

- b) kolaborasi antara pariwisata, olahraga, dan kuliner perlu diperkuat. *Tour de Ijen* misalnya, para wisatawan mancanegara justru berburu buah-buahan seperti rambutan untuk dibawa ke negaranya. Selain itu, *storytelling* merupakan strategi penting yang dapat mengajak para wisatawan untuk datang kembali.
- c) membangun kawasan pariwisata perlu dikerjasamakan dengan berbagai pihak. Kampung wisata misalnya, juga sekaligus dapat dimanfaatkan untuk menyosialisasikan literasi dengan mengembangkannya menjadi Kampung Wisata Literasi.
- d) terkait guru honorer, Komisi X DPR RI telah melakukan banyak hal untuk menyelesaikan masalah guru honorer. Masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu lembaga saja. Ada sekian kementerian/lembaga yang harus berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah ini.
- e) cara dan kiat Banyuwangi dalam mengembangkan pariwisatanya perlu disebarkan kepada daerah lain. Beberapa daerah, telah mengikuti cara Banyuwangi dalam mengembangkan dunia pariwisata yang tetap memperhatikan kehidupan sosial, budaya setempat dengan dukungan pemerintah daerah.
- f) pengembangan dan promosi *homestay* perlu lebih massif dengan dukungan *marketplace*, pengembangan destinasi perlu didukung *storytelling*, penyelenggaraan sport tourism perlu disesuaikan dengan musim buah atau agenda budaya lainnya.
- g) Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI akan mengkaji lebih lanjut permasalahan kepariwisataan yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan di Banyuwangi dan mengkaji hal-hal positif yang telah diraih Pemerintah Daerah Banyuwangi, khususnya dalam bidang pariwisata, sehingga dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam pembahasan kebijakan.

IV. KESIMPULAN

Kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI ke Kabupaten Banyuwangi menyimpulkan sebagai berikut.

1. Bidang Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan dasar sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi telah berjalan dengan baik, bahkan telah mengalami peningkatan baik mutu, akses maupun kualitasnya. Diantara permasalahan yang masih ada yaitu mengenai guru honorer. Adapun untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi, mengingat bukan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam pengelolannya, maka masih sangat diperlukan pembinaan dan koordinasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendikbudristek RI. Diantara permasalahan pendidikan tinggi, antara lain mengenai minimnya SDM pendidikan dengan status ASN (PNS dan PPPK).

2. **Bidang Kebudayaan**

Pelestarian dan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Banyuwangi telah berjalan cukup baik, bahkan telah mampu diintegrasikan dengan pengembangan kepariwisataan di Banyuwangi.

3. **Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Kabupaten Banyuwangi memiliki beberapa kiat dan strategi pengembangan pariwisata, yaitu: (1) adanya kepemimpinan berkelanjutan, visi yang jelas, serta kolaborasi antar instansi terkait; (2) adanya dukungan sejumlah aturan atau regulasi yang berpihak kepada kearifan lokal, tradisi dan budaya, yang antara lain diwujudkan melalui kebijakan tata ruang dan tata bangunan, serta penguasaan lahan yang adil, sehingga masyarakat tetap terlibat dalam pengembangan industri pariwisata tanpa tergusur oleh kekuatan investasi dari luar; (3) adanya dukungan pengembangan wisata dengan model *community-based tourism*, dimana komunitas lokal terlibat aktif dengan terbentuknya berbagai komunitas dalam bentuk asosiasi pariwisata; (4) adanya keterlibatan dan partisipasi langsung dari masing-masing komunitas yang ada di masyarakat dalam penyelenggaraan berbagai even daerah.

4. **Bidang Olahraga dan Kepemudaan**

Pengembangan bidang kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten di Banyuwangi masih perlu ditingkatkan. Namun dalam bidang olahraga, telah ada terobosan untuk mengintegrasikannya dengan bidang pariwisata, dimana Banyuwangi juga mengembangkan pariwisata olahraga dengan memanfaatkan potensi alam, seperti kawasan gunung Ijen yang digunakan sebagai lokasi untuk event lari trail dan hiking, serta surfing di pantai Plengkung juga menjadi daya tarik bagi peselancar dari dalam dan luar negeri.

5. **Bidang Perpustakaan**

Penyelenggaraan bidang perpustakaan secara umum telah berjalan baik, namun masih ada permasalahan mengenai minimnya jumlah tenaga pustakawan. Selain itu, di Kabupaten Banyuwangi juga masih memerlukan pengembangan komunitas-komunitas baca, mengingat luas wilayah Kabupaten Banyuwangi.

V. REKOMENDASI

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Kabupaten Banyuwangi merekomendasikan sebagai berikut.

1. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk dapat menyelesaikan permasalahan dan temuan bidang pendidikan di Banyuwangi, yaitu:
 - a. minimnya SDM pendidikan dengan status PNS dan PPPK, serta terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan di Politeknik Negeri Banyuwangi.
 - b. permasalahan lambatnya pengangkatan guru honorer menjadi ASN (PNS maupun PPPK) di Banyuwangi.

- c. akreditasi program studi pada perguruan tinggi swasta yang dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri dimana biayanya sangat memberatkan.
2. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Banyuwangi untuk mengkaji usulan Bahasa Osing diakui dan dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan, khususnya di Banyuwangi.
3. Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk dapat mengadopsi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi yang menekankan aspek budaya dan konten lokal.
4. Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI dan Kemenpora RI untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Banyuwangi guna meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pariwisata olahraga.
5. Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah untuk segera mengeluarkan kebijakan untuk menambah jumlah tenaga perpustakaan di daerah, termasuk di Kabupaten Banyuwangi.

VI. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022—2023 ke Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan kajian dalam pengambilan kebijakan.

Jakarta, 22 Agustus 2023

**Ketua Tim/
Wakil Ketua Komisi X DPR RI**

Ttd.

Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.PP
A 64